



PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl. tanggal 24 Februari telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/18/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Orang Tua Kandung Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai Anak;
4. Bahwa kurang lebih pada bulan Juli tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi pertengkaran antara lain:
 - Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm 2 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl



Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Konawe Selatan, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 04 Maret 2020 dan 10 Maret 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/18/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I PEMOHON, Umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon dan kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih karena diceritakan Termohon. Penyebab Pemohon dan Termohon berselisih karena Pemohon menginginkan keturunan, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang telah mencapai 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, kakak Termohon pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi, Pemohon dan Termohon tidak saling menemui lagi;

Hlm 4 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Termohon; saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal Termohon bernama TERMOHON, kenal setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juli 2019 tidak rukun lagi karena sering berselisih;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon mengadu kepada saksi apabila keduanya sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon maupun cerita Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon berselisih karena Pemohon menginginkan keturunan namun Pemohon dan Termohon belum diberikan rezeki keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang telah mencapai 4 (empat) bulan lamanya;
 - Bahwa kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua

Hlm 5 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX,
Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa kakak Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menemui, tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk semua yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Andooloo;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm 6 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jls Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dianggap Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Termohon telah mengakui semua isi permohonan sebab tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi fakta tetap (vide Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara a quo merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2019 karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2019, hal mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil

Hlm 7 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1 (satu), bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Pemohon juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah tetangga Termohon, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, Pemohon

Hlm 8 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon belum dikaruniai anak; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan keterangan kedua saksi dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2019 karena Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Pemohon menginginkan keturunan, namun Pemohon dan Termohon belum mendapatkan keturunan. Kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan penyebabnya karena Pemohon menginginkan keturunan karena Pemohon dan Termohon sering bercerita kepada kedua saksi Pemohon; berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih yang disebabkan karena Pemohon menginginkan keturunan, namun Pemohon dan Termohon belum mendapat keturunan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Keterangan kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019, dan kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi, Pemohon dan termohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi. Keterangan kedua saksi

Hlm 9 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.bg, oleh karenanya terbukti sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi, Pemohon dan termohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, kakak Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan berdiri sendiri namun masih mempunyai keterkaitan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 307 R.Bg, maka terbukti telah diupayakan damai oleh kakak Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula bahwa kedua saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis menilai teman dan sepupu Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2013, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dikarena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih, karena Pemohon menginginkan keturunan, namun Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

Hlm 10 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon kini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
5. Bahwa kakak Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang dan tidak pernah kembali rukun lagi; maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah goyah dan rapuh;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan bahwa sendi-sendi rumah tangga sudah tidak dapat menopang lagi, karena seyogianya dalam rumah tangga rasa percaya-mempercayai, rasa sayang-menyayangi, rasa cinta-mencintai, rasa kasih-mengasihi, adalah merupakan pondasi dasar dalam membangun rumah tangga, sedangkan hal tersebut di atas sudah tidak tergambar lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; karena dalam mengarungi biduk rumah tangga Pemohon dan Termohon kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Pemohon sangat menginginkan mempunyai keturunan, namun Pemohon dan Termohon belum diberikan keturunan, hal mana akibat dari seringnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang telah mencapai 4 (empat) bulan, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi lagi dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun, sehingga hal tersebut menyebabkan hilangnya kenyamanan Pemohon dalam berumah tangga dengan Termohon; maka dengan melihat apa yang dialami oleh

Hlm 11 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikategorikan telah pecah (*broken marriage*). Selain itu di muka persidangan Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa kakak Termohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil; selain itu Pemohon kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan hingga saat ini masalah yang dihadapi Pemohon dan Termohon belum menemukan solusi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan apabila dipertahankan maka mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Pemohon, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Termohon terhadap Pemohon, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

" ...Dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) sebagai kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka..."

Hlm 12 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

مِلَّةٌ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآلِهَا

وَالَّذِينَ آمَنُوا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm 14 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Kami Muammar H.AT, S.HI.,M.H., Sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H.,M.H dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Alamsyah, S.HI.,M.H

Ketua Majelis

Muammar,H.AT, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	525.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

Hlm 15 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 16 dari 15 halaman putusan Nomor 0071/Pdt.G./2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)